

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* di Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Kecamatan Poncokusumo dalam satu tahun kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya LKj Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, maka dalam pasal 4 Perda tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan ;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 40 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan.
- b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati ;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan ;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa dan / atau Kelurahan ;
- j. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga – Lembaga lainnya ;
- k. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan ;

- I. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan – kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan ;

Selanjutnya agar eksistensi Camat lebih berperan, mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

a. Sekretariat;

1) Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, pelengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b) Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;

- b) Pengelola urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

b. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;
- d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e) Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

- g) Menghimpun, meengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - c) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
 - e) Menghimpun, mengolah data, dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - f) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak – hak keuangan lainnya;
 - g) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
 - h) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan;
 - i) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana Sub Bagian Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;

- c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan;
- d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan pembangunan Kecamatan;
- g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Kecamatan;
- j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;
- k) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan

1) Mempunyai tugas :

- a) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b) Menyusun program program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- d) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c) Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- d) Membantu menyelesaikan masalah – masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- e) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- f) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

1) Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;

- c) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari – hari;
- f) Membantu penanganan masalah – masalah sosial dan bencana alam;
- g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan

1) Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
- b) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- c) Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa serta mengusulkan pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa;
- d) Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan sanitasi drainase dan air bersih/minum;

- e) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- f) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
- g) Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

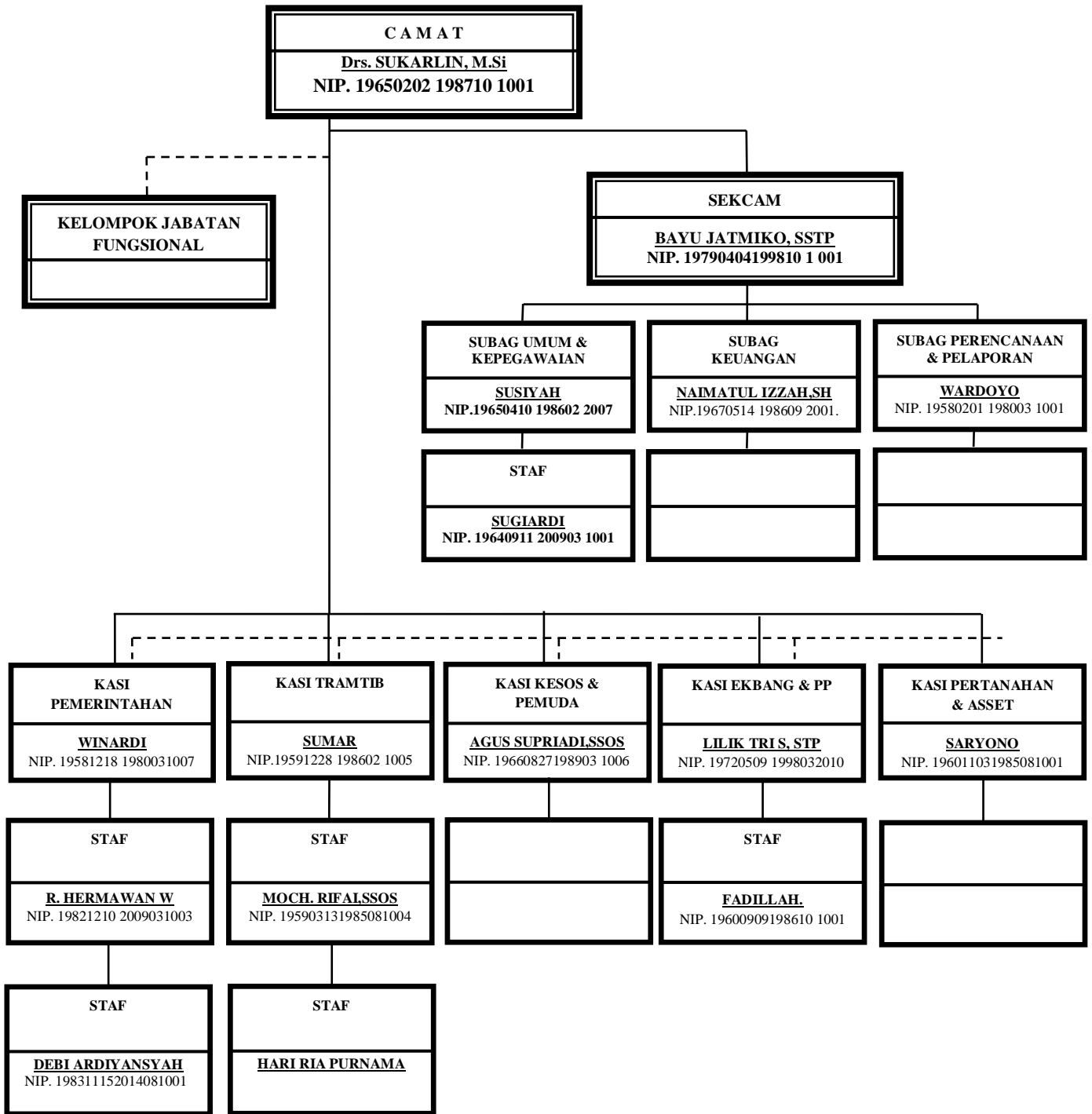
f. Seksi Pertanahan dan Aset

1) Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan aset;
- b) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan/Kelurahan/Desa serta sarana dan prasarana umum;
- c) Membantu menyusun program dan pembinaan dibidang pertanahan;
- d) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang – barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- e) Mengumpulkan, mengolah, mensistimarisasikan dan memelihara data barang;
- f) Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);

- g) Melakukan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum;
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PONCOKUSUMO



2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebanyak 17 orang, adapun dari kepangkatan dan golongan pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	1	Pembina	1	III/a	1
S1	4	Penata TK.I	3	III/b	1
D3	0	Penata	5	IV/a	5
SMA	10	Penata Muda Tk I	2	IV/b	3
		Pengatur Tk I	1		
		Pengatur Muda	2		
		Juru	1		
Jumlah	15		15		10
Tenaga sukwan : 2 orang					

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Poncokusumo didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

Tabel 1.2
Data Sarana Prasarana

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3	Panti PKK	1 buah	Rusak Ringan
4	Rumah Sekcam	1 buah	Rusak Ringan
5	Meja Kerja	22 buah	Baik
6	Kursi Kerja	22 buah	Baik
7	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
8	Kamar mandi	2 buah	Baik
9	Fasilitas ibadah (muhola)	1 buah	Baik
10	Komputer	5 buah	Sedang
11	Printer	5 buah	Sedang
12	Lemari arsip	7 buah	Sedang
13	Mesin ketik	2 buah	Rusak
14	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
15	Ruang Bebas rokok	1 buah	Baik
16	Kendaraan dinas roda 2	6 buah	Baik
17	Kendaraan dinas roda 4	2 buah	Baik

3. Capaian Kinerja Kecamatan Poncokusumo Tahun 2013

Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Poncokusumo sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) terbagi dalam 3 (tiga) hal antara lain :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah peserta Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah penduduk	0,0017	0,0017	100 %

Fokus capaian kinerja Tahun 2013 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator pertama ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 100% (seratus persen). Dengan penjelasan bahwa target 0,0017 diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah peserta Musrenbangcam yang direncanakan pada Tahun 2013 sejumlah 170 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk sejumlah 97.445 jiwa. Sedangkan realisasinya sebesar 0,0017 diperoleh dengan menghitung perbandingan antara realisasi jumlah peserta Musrenbangcam yang hadir sebanyak 171 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk sejumlah 97.445 jiwa. Sebagaimana daftar hadir terlampir.

Tercapainya target kinerja sebesar 0,0017 dengan realisasi sebesar 0,0017 ini pada Tahun 2013 apabila dilihat pada target Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Poncokusumo dan juga Renja (Rencana Kerja) Tahun 2013 maka telah terpenuhi dan sesuai dengan

apa yang telah direncanakan. Skor tersebut merupakan skor riil yang muncul yang mana meskipun terlihat kecil akan tetapi dengan melihat jumlah pembandingnya yaitu jumlah penduduk yang besar maka hal itu mempengaruhi hasil akhir penilaian. Oleh karena itu dengan jumlah peserta yang sama pada kecamatan lain belum tentu hasil hitung yang sama pula dikarenakan jumlah penduduk yang berbeda.

Dalam indikator pertama ini terkait pelaksanaan Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Poncokusumo pada Tahun 2013. Dalam persiapannya telah dibentuk Tim Monitoring Kecamatan Poncokusumo oleh Camat Poncokusumo dengan *leading sector* adalah Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan (Kasi. Ekbang dan PP). Dijadwalkan pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa (Musrenbangdes) sebanyak 17 (tujuh belas) desa se-Kecamatan Poncokusumo serta pendampingan dan monitoring sebanyak 2 (dua) tim yang masing-masing tim mewakili juga unsur dinas/ instansi di Kecamatan Poncokusumo. Dengan Tim yang turun dan datang ke desa-desa sesuai penjadualannya diharapkan mampu mengarahkan dan menjaga agar usulan dari desa itu lebih fokus dan tajam sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Poncokusumo, bersama dinas/ instansi terkait, pada akhirnya dapat menuntaskan sesuai jadwal. Selesai dalam kurun waktu \pm 8 hari kerja. Dalam penjaringan setiap desa telah dikumpulkan beberapa usulan program dan kegiatan meliputi hal infrastruktur, sosial budaya,

dan ekonomi. Dan juga desa disepakati untuk masing-masing delegasi/ perwakilan yang nantinya akan menghadiri Musrenbangcam di Kecamatan Poncokusumo. Perwakilan ataupun bahasa delegasi ini selain merupakan tim negoisator yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mempertahankan usulan desanya dengan dasar argument yang kuat, juga sebagai entitas perwakilan dari partisipasi masyarakat desa tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Dalam substansi berbagai usulan yang telah dirangkum dan disepakati dari acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu maka nantinya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) desa tersebut. Pada lanjutannya diusulkan, dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), pada akhirnya *goal* yang diharapkan dapat diajukan, diusulkan dan berhasil masuk dalam hasil Skala Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Pebruari 2013 di Pendopo Kecamatan Poncokusumo dihadiri dari Dinas/ instansi terkait khususnya Tim dari Kabupaten Malang dengan *leading sector* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang (Bappeda) dan/ atau Dinas/ Instansi lain sesuai penunjukan dari Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Begitu juga selain para undangan dari unsur desa juga turut dihadiri oleh unsur Dinas/ instansi, Organisasi sosial dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan Poncokusumo

dengan total kehadiran sebanyak 170 orang peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2013 tersebut secara teknis dipandu oleh tim terbagi kedalam beberapa kelompok diskusi yang bermaksud untuk membagi usulan sesuai bidang masing-masing, serta dalam bahasan kelompok tersebut agar lebih fokus dan mengarah pada satu bidang dari sekian banyak peserta yang hadir dan sekian banyak usulan yang telah menjadi usulan formal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Dari hasil diskusi berbagai usulan program dan kegiatan yang telah dirangkum dan disepakati dari acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) itu pada akhirnya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), sesuai dengan Skala Prioritas. Selanjutnya diusulkan, dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab), pada akhirnya *goal* yang diharapkan dapat diajukan, diusulkan dan berhasil masuk dalam hasil Skala Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Daftar Usulan sebagaimana terlampir.

Analisis umum pendukung keberhasilan tercapainya target tersebut diatas adalah faktor iklim cuaca alam tidak dapat dipungkiri menjadi pendukung keberhasilan terpenuhinya target tingkat partisipasi tersebut. Meskipun bukan menjadi alasan utama, akan tetapi kondisi yang bersifat situasional ini patut dilaporkan menjadi faktor penguat pendukung kesuksesan acara. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) yang dilaksanakan ketika itu dalam kondisi terang dari awal sampai dengan akhir acara kami anggap menjadi alasan pendukung ketercapaian target kinerja bidang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2013.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2.	Peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan	Rata-rata lama hari proses penyelesaian dibandingkan dengan alokasi waktu penyelesaian sesuai SOP	1	1	100 %

Fokus capaian kinerja Tahun 2013 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator kedua ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 100% (seratus persen). Dengan penjelasan bahwa target skor 1 diperoleh dengan menghitung perbandingan antara rata-rata lama proses penyelesaian per-1 pemohon baik KTP, KK, Mutasi dibandingkan dengan alokasi waktu sesuai SOP yaitu 20 menit. Dalam pembulatangannya SOP dihitung per-1 hari maka hasilnya adalah 1. Sedangkan realisasinya sebesar 1 diperoleh dengan cara hitung yang sama. Sehingga capaian kinerjanya adalah 100% tersebut.

Ulasan pada kegiatan indikator ini tidak dapat dipisahkan dari tingkat pemahaman petugas yang ditunjuk dalam menjalankan tugasnya serta korelasi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing layanan tersebut. Selanjutnya juga harus didukung oleh

komponen-komponen lain seperti sarana dan prasarana, kelengkapan berkas pemohon itu sendiri dan juga tingkat pelayanan yang harus dilayani secara bersamaan pada saat itu. Hal ini sangat penting dan menjadikan perhatian dalam memberikan penilaian terhadap waktu penyelesaian proses pelayanan administrasi kependudukan, sehingga bias ini menjadikan 'rata-rata pelayanan' adalah kata-kata yang mendekati nilai wajar.

Untuk hal pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbagi dalam pemohon KTP pemula dan KTP perpanjangan. Untuk proses pelayanan ini sesuai aturan yang telah ditetapkan dan belum berubah adalah harus dilakukan dari bawah atau tingkat desa, didalamnya pemohon harus melalui formal aturan dari tingkat Rukun Tetangga (RT) selanjutnya Rukun Warga (RW) dan pengesahan pengajuan di tingkat desa masing-masing dalam bentuk sebutan form Surat Pengantar. Dasar yang krusial bahwa pemohon harus telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah hal penting yang dipedomani. Dalam proses akhir layanan KTP ini harus diproses cetak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (Dispendukcapil) di Kepanjen.

Selanjutnya sebagaimana hal diatas manakala telah dipenuhi maka pelayanan administrasi kependudukan khususnya KTP baru nilai hitung prosesnya, sehingga diperjelas bahwa pelayanan di tingkat desa bukanlah masuk dalam hitungan waktu proses pelayanan administrasi kependudukan KTP, walaupun tidak dapat dipisahkan mekanisme atau sistem administrasi ini.

Hal ini juga berlaku sama untuk 2 (dua) pelayanan lainnya yaitu permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Pindah Penduduk, pemohon harus melalui standar formal dari tingkat bawah sampai di

tingkat kecamatan dan juga finalisasi di Dispendukcapil. Pengantar dari kecamatan baik KTP, KK dan Mutasi Pindah Penduduk inilah yang menjadi produk pelayanan yang dijadikan obyek sarasannya. Adapun esensinya adalah pada hal lama proses waktu pelayanannya yang secara global menjadi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Terkait antara target dan realisasi capaian dalam Penetapan Kinerja maka sedikit berbeda tentang hal substansinya. Dengan penjelasan bahwa target yang diperjanjikan pelayanan Pengantar KTP minimal 3 orang pemohon KTP per-hari dalam pelaksanaan Tahun 2013 ini secara rata-rata dapat dipenuhi. Begitu pula dalam hal pelayanan Pengantar KK, rata-rata per-hari melayani 2 pemohon. Sedangkan pelayanan Pengantar Mutasi Pindah Penduduk rata-rata 3 pemohon per-hari. Sebagaimana daftar bukti terlampir.

Pencapaian realisasi indikator kedua Tahun 2013 ini tidak terlepas dari upaya *leading sector* Kasi Pemerintahan dalam memenuhi hal-hal pendukung pelayanan itu sendiri, baik materiil dan non materiilnya serta hal kontrol terhadap kinerja petugas pelayanannya. Dilakukan secara kontinu dan evaluasi dalam setiap bulannya. Bukti laporan rata-rata pelayanan sebagaimana berkas terlampir.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
3.	Peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui siskamling	Jumlah kelompok Siskamling aktif dibandingkan dengan jumlah RW	0,23	0,23	100 %

Pencapaian realisasi indikator ketiga ini pada Tahun 2013 antara target dan realisasi dapat dipenuhi yaitu tercapai 100%. Dengan penjelasan bahwa target 0,23 diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah kelompok Siskamling aktif yang direncanakan pada Tahun 2013 sejumlah 40 kelompok dibandingkan dengan jumlah RW (Rukun Warga) sejumlah 168. Sedangkan realisasinya sebesar 0,23 diperoleh dengan menghitung perbandingan antara realisasi jumlah kelompok Siskamling aktif sebanyak 40 kelompok dibandingkan dengan jumlah RW (Rukun Warga) sejumlah 168. Sebagaimana buku laporan terlampir

Dalam indikator ketiga ini terkait pelaksanaan tingkat keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling dengan indikator sasarannya adalah jumlah kelompok siskamling yang aktif. Perlu dipahami sebelumnya bahwa tidak selamanya linier antara perbandingan ada atau tidaknya, maupun sedikit atau banyaknya jumlah Poskamling dalam suatu desa/ kecamatan dengan tingkat keamanan dan tingkat tindak kejahatan dengan bukti tidak adanya survey terkait. Akan tetapi korelasi yang diharapkan dengan jumlah Siskamling/ Poskamling tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakatnya atau dalam tataran proses, sedangkan hasil/ kenyataannya belum dikorelasikan. Minimal merupakan bagian dari proses upaya untuk tetap menjaga keamanan lingkungan dalam suatu daerah.

Secara hitungan desa sebanyak 17 (tujuh belas) desa se-kecamatan Poncokusumo dimana secara normatif minimal terdapat 17 (tujuh belas) kelompok Siskamling desa, yang mana secara umum disetiap desa tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) titik Poskamling saja, karena desa dengan luasan wilayahnya masih terbagi kedalam dusun, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Oleh karena itu jumlah

Poskamling yang ada tersebut masih perlu dipilah lagi antara Poskamling yang aktif dan tidak.

Dalam pengukuran dan penilaian indikator ketiga ini sedikit beda dikarenakan obyek indikator sasaran ini berada di luar kantor atau eksternal, juga dalam subyektifitas penilai mempengaruhi indikator ini. Subyek penilaian antara aktif dan tidak aktif inilah yang harus dijaga dan diperhatikan. *Leading sector* yaitu Kasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Trantib) berusaha semaksimal mungkin memilah dan memilah jumlah Poskamling/ Siskamling di setiap desa sejumlah 17 desa, mana yang masuk kategori aktif dan tidak aktif. Sudut pandang yang dipakai bahwa apabila terdapat Poskamling dengan realita terdapat jadwal pelaksanaan jaga harian oleh warga masyarakat setempat maka hal ini dikategorikan sebagai Siskamling yang aktif. Sebaliknya meskipun terdapat Poskamling secara fisik bangunannya ada apabila tidak terdapat aktifitas jaga oleh masyarakat setempat maka belum dapat dikategorikan sebagai Siskamling yang aktif.

Sebagai analisa kewilayahan, sebenarnya faktor koordinasi antar pihak sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian indikator ini. Koordinasi kemuspikaan itu sendiri yaitu pihak Kepolisian/ Polsek, TNI/ Koramil dan Pemerintah Kecamatan Poncokusumo serta pemerintah desa adalah faktor utamanya, sedangkan koordinasi dan pembinaan sebagai faktor utama tersebut harus diimplementasikan sampai di tingkat bawah kepada tokoh-tokoh masyarakat dan komunitas kelompok masyarakat di bidang keamanan.

Maka dalam upaya meningkatkan indikator ketiga pada Tahun 2013 ini sebenarnya Kecamatan Poncokusumo itu sendiri telah melakukan fungsi komunikasi dan koordinasi kewilayahan bidang

keamanan dan ketertiban 3 (tiga) pilar sebagaimana yang telah ditetapkan secara nasional.

D. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU)
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 ;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan ;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
- r. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat ;
- s. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama ;
- t. Peraturan Bupati Malang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Review terhadap RPJMD ;

- u. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Siskamling di Wilayah Kabupaten Malang ;
- v. Keputusan Bupati Malang Nomor 180/646/KEP/421.013/2012 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2012-2015 ;
- w. Keputusan Bupati Malang Nomor 180/567/KEP/421.013/2012 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2013 ;

E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Sumber Daya Aparatur
 - 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2013
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Startegis

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014
2. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2014 dengan Realisasi Tahun 2013 dan Capaian sampai dengan Tahun 2014
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah pada Perencanaan Strategis Organisasi
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Standar Nasional
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja atas Alternatif Solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran - Lampiran

1. Lampiran I Penetapan Kinerja 2014
2. Lampiran II Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2014
3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014
4. Lampiran IV Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011 – 2015

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

“ Terselenggaranya Pelayanan Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang optimal dalam mewujudkan Kecamatan Poncokusumo yang Maju“

Dengan visi tersebut diharapkan dalam lima tahun kedepan melalui pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan diharapkan akan terwujud Kecamatan Poncokusumo yang semakin meningkat kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunannya.

2. Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan suatu Misi yaitu:

“ Mengoptimalkan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Poncokusumo melalui peningkatan pelayanan, koordinasi dan kualitas SDM aparatur”

Di mana misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam kehidupan beragama
- b. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah
- c. Mengupayakan terwujudnya pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan publik
- d. Mewujudkan keseimbangan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka melaksanakan kebijakan Kepala Daerah

- e. Mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan

Pencapaian visi dan misi Kecamatan Poncokusumo adalah untuk meningkatkan fungsi dan peran Kecamatan Poncokusumo melalui peningkatan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi di segala bidang dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Sasaran dan Indikator Sasaran

➤ Sasaran :

- Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).
- Peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan.
- Peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling.

➤ Indikator Sasaran :

- Tingkat partisipasi perwakilan masyarakat/ peserta yang hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).
- Kelancaran proses Administrasi Kependudukan.
- Keaktifan Siskamling.

Program

Program –program yang dilaksanakan Kecamatan Poncokusumo antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan sarana dan prasarana

- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
- Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan

Dalam menunjang program-program tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan makanan dan minum
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
- Pengiriman aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja antara Camat dengan Bupati yang dituangkan didalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah peserta Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah penduduk	0,0019

Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2014 pada tabel diatas tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Poncokusumo dengan indikatornya yaitu jumlah peserta Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2014 di Kecamatan Poncokusumo.

Formulasi yang diterapkan dalam penentuan indikator ini adalah dengan cara menghitung jumlah perbandingan antara jumlah peserta yang direncanakan hadir dalam Musrenbangcam direncanakan sesuai dengan penetapan kinerja, dalam hal ini direncanakan target pada Tahun 2014 sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) orang. Dianggap dengan peningkatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya maka dapat dikatakan mengimbangi linier dengan peningkatan kinerja secara progresif. Kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2014 sebanyak 97.889 jiwa. Sehingga skor targetnya adalah 0,0019 pada Tahun 2014.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2.	Peningkatan kelancaran proses administrasi kependudukan	Rata-rata lama hari proses penyelesaian dibandingkan dengan alokasi waktu penyelesaian sesuai SOP	1

Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2014 pada tabel diatas tentang Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan. Fokusnya adalah hal pelayanan kependudukan yang terkait dengan Pengantar KTP dan Surat Pindah Penduduk/ mutasi. Meskipun sebagaimana kenyataan riil yang ada sebenarnya bahwa

pelayanan administrasi kependudukan itu tidak hanya 2 (dua) produk layanan itu saja, akan tetapi masih banyak pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh kecamatan khususnya di Kecamatan Poncokusumo.

Formulasi yang dipakai dalam mengukur tercapainya kinerja dalam indikator ini adalah dengan dengan cara menghitung waktu, yakni rata-rata lama proses penyelesaian dibandingkan dengan alokasi waktu penyelesaian sesuai SOP waktu penyelesaian. Dalam hal ini dibulatkan pembanding tersebut berapapun menitnya maka dihitung 1 hari. Kemudian bahwa apapun pelayanannya per-1 orang dibandingkan dengan per-1 hari lama proses maka menghasilkan skor target 1.

Sebagai evaluasi sebenarnya dalam penentuan indikator ini seharusnya dapat membandingkan antara kecepatan dalam melayani per-1 (satu) orang pemohon dibandingkan dengan waktu yang ditentukan dengan Standar Operasional Prosedur yang bersangkutan, semisal dalam SOP Pengantar KTP bila ditentukan batas waktu yang disediakan selama 20 (dua puluh) menit maka ini diperbandingkan dengan realisasi waktu rata-rata pelayanan Pengantar KTP yang dilaksanakan oleh petugas.

Yang menjadikan permasalahan ketika dengan banyaknya jenis-jenis pelayanan umum yang dilaksanakan oleh kecamatan, khususnya Kecamatan Poncokusumo apabila hanya diwakili oleh 2-3 jenis pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan saja maka hasil apapun itu dirasakan kurang mewakili secara general terhadap pelayanan secara umum. Akan tetapi apabila semua jenis pelayanan yang ada tersebut kemudian semuanya akan diukur dan dinilai capaian kerjanya maka tentunya tidaklah mungkin dilakukan secara sempurna,

terdapat keterbatasan. Oleh karena itu sesuai dengan IKU dan juga penetapan kinerja maka cukup 2 (dua) hal tersebut diatas yang menjadi kegiatan ukuran dalam proses administrasi kependudukan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
3.	Peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling	Jumlah kelompok Siskamling aktif dibandingkan dengan jumlah RW	0,26

Perjanjian Kinerja yang diatas adalah tentang Tingkat Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan dikaitkan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Indikator kinerja yang ditentukan adalah jumlah kelompok Siskamling yang aktif dibandingkan dengan jumlah RW (Rukun Warga).

Target yang ditentukan dalam indikator ini adalah dengan membandingkan antara rencana jumlah kelompok Siskamling yang aktif sejumlah 44 dibandingkan dengan keseluruhan RW (Rukun Warga) yang ada dalam 1 kecamatan Poncokusumo sejumlah 168 RW, tersebar pada desa-desa sampai dengan tingkat RT se-Kecamatan Poncokusumo. Dengan hasil penghitungannya adalah sebesar target 0,26. Skor target ini diperjanjikan pada Tahun 2014.

Seperti ulasan yang lalu bahwa dalam indikator ini sangat dipengaruhi oleh subyek pelaku penilai. Hal ini dikarenakan selain obyek pengukuran terdapat diluar kantor (eksternal) juga dikarenakan berada dalam dinamika kehidupan masyarakat langsung. Dinamika/ dinamis berarti adalah variabel bebas, yakni apa saja bisa terjadi sewaktu-waktu tergantung kepada dinamika yang terjadi pada masyarakat itu. Seperti

contoh yaitu suatu Siskamling pada Poskamling di dusun A, minggu lalu masih aktif akan tetapi pada 1 (satu) minggu kedepan atau 1 (satu) bulan kedepan belum tentu aktif seperti biasa. Kemudian setelah melalui masa pasif bisa menjadi aktif, juga dikarenakan suatu penyebab/ faktor.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah peserta Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah penduduk	0,0019	0,0019	100%

Perhitungan capaian kinerja pada Tahun 2014 seperti tertampil pada table diatas berdasarkan hitungan formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Bupati Malang nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana berikut :

$$\frac{\text{Jumlah peserta musrenbangcam}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Dikaitkan dengan target sesuai Penetapan Kinerja (Tapkin) dengan realisasi kehadiran 187 orang peserta jika dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk per-Tahun 2014 adalah sejumlah 97.889 jiwa/ orang maka hasilnya adalah 0,0019. Kemudian dikomparasikan dengan skor target sebesar 0,0019 maka capaian kinerjanya adalah 100%. Angka ini adalah angka realistis sesuai formulasi yang membandingkan jumlah realisasi peserta yang hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

(Musrenbangcam) dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam 1 (satu) kecamatan pada Tahun 2014.

Apabila jika diperbandingkan pada hanya sebatas perbandingan kasar antara hanya jumlah yang ditargetkan hadir pada Tahun 2014 sejumlah 190 peserta dengan realisasi jumlah yang hadir sejumlah 189 orang maka target tersebut tidak tercapai, dengan capaian sekedar perbandingan sebesar 98%. Kenapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya di bawah.

Bahasan diatas ditampilkan untuk sekedar untuk mengetahui tingkat partisipasi/ keterwakilan masyarakat pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) pada Tahun 2014 dibandingkan dengan jumlah penduduk. Sehingga secara capaian target dan realisasi terpenuhi 98% (Sembilan puluh delapan persen) sedangkan secara hitungan formula Indikator Kinerja Utama adalah 0,0019 dari populasi jumlah penduduk saat itu. Bukti daftar hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2014 sebagaimana terlampir.

Penjelasan terkait pelaksanaan Tingkat Capaian Kinerja tentang Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Poncokusumo pada Tahun 2014 akan kami berikan secara deskripsi sesuai urutan waktu dan tahapannya agar dapat memahami secara jelas dari awal sampai akhir kegiatannya.

Langkah awal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Poncokusumo dengan langkah

dibentuknya Tim Monitoring Kecamatan Poncokusumo oleh Camat Poncokusumo dengan *leading sector* Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan (Kasi. Ekbang dan PP) Kecamatan Poncokusumo. Selanjutnya segera dilakukan penjadualan pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa (Musrenbangdes) dimana tim pendampingan dan monitoring dibagi kedalam 2 (dua) tim yang masing-masing tim mewakili juga sudah termasuk keterwakilan unsur dinas/ instansi di Kecamatan Poncokusumo. Dengan Tim yang turun dan datang ke desa-desa sesuai penjadualannya diharapkan mampu mengarahkan dan menjaga agar usulan dari desa itu lebih fokus dan tajam sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Poncokusumo, bersama dinas/ instansi terkait, pada akhirnya dapat menuntaskan sesuai jadwal. Selesai dalam kurun waktu \pm 9 hari kerja. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di setiap desa telah dijaring dan dikumpulkan beberapa usulan program dan kegiatan meliputi hal infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi. Dan juga desa disepakati untuk masing-masing delegasi/ perwakilan yang nantinya akan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Poncokusumo. Setiap perwakilan delegasi ini selain merupakan para negoisator yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mempertahankan usulan desanya dengan dasar argument yang kuat, juga sebagai entitas perwakilan dari partisipasi masyarakat desa tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari 2014 di Pendopo Kecamatan Poncokusumo dihadiri dari Dinas/ instansi terkait khususnya Tim dari Kabupaten Malang dengan *leading sector* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang (Bappeda) dan/ atau Dinas/ Instansi lain sesuai penunjukan dari Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Begitu juga selain para undangan dari unsur desa juga turut dihadiri oleh unsur Dinas/ instansi, Organisasi sosial dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan Poncokusumo dengan total kehadiran sebanyak 187 orang peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dari target awal yang diharapkan sebanyak 190 orang, sebagaimana bukti daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2014 tersebut secara teknis dipandu oleh tim terbagi kedalam beberapa kelompok diskusi yang bermaksud untuk membagi usulan sesuai bidang masing-masing, serta dalam bahasan kelompok tersebut agar lebih fokus dan mengarah pada satu bidang dari sekian banyak peserta yang hadir dan sekian banyak usulan yang telah menjadi usulan formal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Hasil diskusi dan debat argument dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) itu pada akhirnya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), tentunya sesuai dengan Skala Prioritas Tingkat Kecamatan. Selanjutnya diusulkan,

dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab).

Terkait hal fokus capaian kinerja Tahun 2014 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator pertama ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 98% (Sembilan puluh delapan persen). Tentunya dikatakan belum mencapai target atau belum maksimal. Hal ini bukan dikarenakan upaya koordinasi dan komunikasi yang kurang maksimal oleh *leading sector* Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan (Kasi. Ekbang dan PP) serta Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dengan Pemerintah Desa, upaya antisipasi dan langkah penambahan peserta rapat secara mendadak juga sudah dilakukan.

Menurut analisa kami faktor iklim cuaca alam pada saat berlangsungnya acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2014 yang dalam kondisi hujan menjadi faktor penyebab kegagalan terpenuhinya target tingkat partisipasi tersebut. Pada hari dimana dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) tersebut pada pagi hari sudah dalam kondisi mendung, yang mana pada sebelum acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) itu akan dimulai gerimis/ hujan sudah turun sampai dengan sore hari.

Kondisi yang bersifat situasional dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*) ini patut dilaporkan menjadi faktor penguat atas tidak dapat tercapainya target dan realisasi acara alam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2014. Menjadi alasan manusiawi ketika

dalam kondisi hujan seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya, keterbatasan sarana dan prasarana ketika cuaca hujan dianggap lebih memberatkan dibandingkan niat yang sudah ada.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
2	Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Rata-rata lama hari proses penyelesaian dibandingkan dengan alokasi waktu penyelesaian sesuai SOP	1	1	100%

Perhitungan capaian kinerja pada Tahun 2014 seperti tertampil pada table diatas berdasarkan hitungan formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Bupati Malang nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana berikut :

Rata-rata lama hari proses <u>penyelesaian</u> SOP pemrosesan

Indikator Peningkatan Kelancaran Proses administrasi Kependudukan Tahun 2014, dengan target yang ingin dicapai Kecamatan Poncokusumo dengan nilai skor 1 sesuai indikator kinerja rata-rata lama proses penyelesaian dibandingkan dengan alokasi waktu penyelesaian adalah 1 banding 1, dalam realisasinya rata-rata dalam Tahun 2014 tercapai capaian 100%. Hitungan ini bukan tentang berapa banyak atau sedikit dapat melayani administrasi kependudukan yaitu pengantar KTP, KK maupun Mutasi Pindah. Hitungan yang kami terapkan sesuai formulasi IKU bahwa membandingkan pada per-1 orang pemohon dengan waktu

penyelesaian sesuai SOP yang mana seberapa menit pelaksanaannya itu dibulatkan dalam hitungan 1 hari. Dengan kata lain skor pembandingnya adalah 1 hari.

Selanjutnya kami anggap perlu menjelaskan tentang perjalanan tentang administrasi Kependudukan bidang pelayanan Pengantar KTP dan Mutasi Pindah Penduduk, perlu kiranya kami jelaskan sekilas dinamika berkaitan dengan hal terkait dalam perjalanan kurun waktu Tahun 2014, sehingga memahami kondisi yang terjadi waktu tahun berjalan tersebut.

Pada awal tahun dalam proses pelayanan KTP (Kartu Tanda penduduk) bagi warga masyarakat tersebut untuk di Kecamatan Poncokusumo dan juga di kecamatan-kecamatan lain se-Kabupaten Malang adalah dapatnya proses cetak KTP tersebut di kecamatan. Hal ini terkait kebijakan Menteri Dalam Negeri yang berlaku secara nasional. Meskipun dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan terkait ketersediaan blangko KTP yang distribusikan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (Dispendukcapil). Sering terjadinya keterlambatan bahkan kehabisan blangko pada awalnya menghambat proses pelayanannya. Kemudian pada pertengahan Tahun 2014, sekitar bulan Mei terdapat kebijakan baru dari Menteri Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh surat Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang dengan kembalinya proses cetak KTP pada Dispendukcapil.

Terkait proses Mutasi Pindah Penduduk tidak ada permasalahan dari awal tahun sampai dengan akhir Tahun 2014. Mutasi yang dibedakan antara dalam Kecamatan dengan antar Kecamatan sampai dengan antar Kecamatan antar kabupaten/ Kota.

Pelayanan berjalan seperti biasa, hanya saja untuk pindah penduduk keluar Kabupaten harus ditandatangani langsung oleh camat.

Dukungan hal internal kantor seperti tersebut diatas adalah diantaranya selain ketersediaan sarana dan prasarananya juga kualitas dan kemampuan dari petugas yang melayani kepada masyarakat. Dengan berbanding lurus maka target dan realisasi dari Proses Administrasi Kependudukan dapat dipacu secara linier pula, selebihnya bergantung kepada faktor eksternal yakni tingkat kesadaran dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri untuk datang dan meminta untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud.

Demikian penjelasan capaian kinerja diatas yang kesemuanya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sebenarnya formulasi yang ditetapkan tersebut dengan hasil skor hasil yang ada bertujuan bahwa terjadi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai bagian dari sekian banyak pelayanan-pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Poncokusumo.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
3	Peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling	Jumlah kelompok Siskamling aktif dibandingkan dengan jumlah RW	0,26	0,26	100 %

Sebelum panjang lebar menjelaskan tentang capaian kinerja yang berkaitan dengan hal ini yakni berkaitan dengan substansi keaktifan Siskamling dengan obyek Poskamling maka perlu kami jelaskan sebagai berikut. Dipahami secara normatif yang benar bahwa suatu keaktifan Siskamling/ Poskamling itu harus memenuhi kriteria sebagaimana berikut :

1. Kelengkapan Administrasi : Buku Daftar Hadir, Buku Piket Jaga, Buku Tamu, Buku Laporan Kejadian, Buku Inventaris.
2. Kelengkapan Sarana : Kentongan, Senter, *Kenthes*, *Gepyok* Karung, HT.

Oleh karena itu kami mempertegas dalam uraian ini bahwa didalam sudut pandang kami bahwa penilaian tingkat keaktifan suatu Siskamling/ Poskamling itu sebenarnya harus mempunyai standar sesuai tersebut diatas. Akan tetapi manakala hal tersebut diterapkan maka dengan keterbatasan baik pendanaan, prasarana dan sarana yang ada maka jika diterapkan secara normatif akan menimbulkan konsekuensi logis yang harus dipenuhi oleh pihak pemerintah baik kecamatan ataupun desa. Sehingga khusus penilaian dalam hal ini kami memakai pola minimal yakni minimal tentang adanya aktivitas jaga yang dilaksanakan oleh warga masyarakat di lingkungan sekitar Poskamling tersebut.

Korelasi bahasan dalam capaian kinerja bidang Keaktifan Siskamling ini substansi yang kami bahas adalah tentang hal upaya. Upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan bersama Muspika serta Pemerintah Desa dalam mengaktifkan kegiatan Poskamling tersebut. Sehingga tentunya berimbang kepada tingkat komunikasi dan koordinasi lintas sektor. Hal ini penting dan mendasar sebagai sebuah

pemahaman karena bidang keamanan dan ketertiban lingkungan karena selain obyeknya berada di eksternal kantor juga dipengaruhi banyak pihak dengan dinamika yang sangat abstrak. Abstrak dalam artian apapun bisa terjadi sewaktu-waktu mengikuti pula dinamika kehidupan masyarakat.

Laporan upaya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Poncokusumo tentunya apabila difokuskan kepada pelaksana di tingkat bawah yaitu di desa adalah para anggota Hansip. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Poncokusumo selama kurun waktu Tahun 2014, sebanyak 4 (empat) kali kegiatan yaitu bulan Januari, Maret, Juni dan Oktober 2014 sebagaimana bukti daftar terlampir.

Kajian yang terjadi saat ini dengan sudah banyaknya Poskamling yang tersebar di 17 (tujuh belas) desa se-Kecamatan Poncokusumo sejumlah 140 (seratus empat puluh) Poskamling yang ada maka kami berupaya secara intensifikasi untuk memberdayakan apa yang sudah ada. Maksimal jika apa yang sudah ada sejumlah tersebut diatas dapat menjadi aktif keseluruhan. Poskamling yang seharusnya dibangun untuk media berkumpul dengan kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan harus secara *kontinu* dapat dipertanggungjawabkan, tidak sekedar dibangun saja kemudian dalam perjalanannya tidak dimanfaatkan. Tidak ada statement yang menyatakan bahwa dengan adanya Poskamling yang banyak kemudian suatu daerah atau lingkungan itu kemudian menjadi aman.

Perhitungan capaian kinerja pada Tahun 2014 seperti tertampil pada table diatas berdasarkan hitungan formulasi Indikator

Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Bupati Malang nomor 28 Tahun 2013 sebagaimana berikut :

$\frac{\text{Jumlah Kelompok Siskamling Aktif}}{\text{Jumlah RW}}$
--

Dalam hal ini Kecamatan Poncokusumo yang sebelumnya memiliki 40 (empat puluh) Siskamling yang tersebar di 17 (tujuh belas) Desa. Pada Tahun 2014 menargetkan peningkatan sejumlah 44 (empat puluh empat) kelompok Siskamling aktif. Target yang telah diperjanjikan adalah sebesar 0,26 dengan penjelasan berasal dari target kelompok Siskamling aktif sejumlah 44 dibandingkan dengan jumlah 168 RW se-Kecamatan Poncokusumo. Tercapainya realisasi sebesar 0,26 berasal dari realisasi jumlah Siskamling aktif sejumlah 44 dibandingkan dengan 168 RW.

Ketercapaian ini selain upaya monitoring dari Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Poncokusumo (Kasi. Trantib) sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsinya, tentunya juga merupakan wujud dari kerjasama dan koordinasi 3 (tiga) pilar yakni Kecamatan, Kepolisian dan TNI (Muspika) beserta unsur Pemerintah Desa dan komponen partisipasi masyarakat.

Pencapaian realisasi dari target yang ditentukan di bidang kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui keaktifan Siskamling ini tentunya tidak dapat dijadikan tolak ukur satu-satunya bagi realita keamanan dan ketertiban di lapangan. Karena tidak dapat dibebankan hanya dengan timbulnya keaktifan Siskamling semata maka suatu wilayah atau desa dijamin aman. Akan tetapi pula minimal dengan adanya partisipasi masyarakat dengan Siskamling ini maka diharapkan dapat meminimalisir gangguan terhadap keamanan.

2. a. Perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2014 dengan Realisasi Tahun 2013

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah peserta Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah penduduk	0,0017	0,0017	100%	0,0019	0,0019	100%

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbangcam, berkaitan dengan hal perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2013 adalah bahwa terdapat selisih realisasi sebesar 0,0002. Sedangkan peningkatan kenaikan yang terjadi antara Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2013 adalah sebesar 11,7%.

Meskipun secara hitungan riil terdapat selisih kurang dari target jumlah peserta/ undangan yang hadir pada Tahun 2014 akan tetapi selisih yang hanya 3 orang tidak mempengaruhi skor akhir hasil penghitungan sesuai formulasi, secara keseluruhan target realisasi tercapai.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Rata-rata lama hari proses penyelesaian dibandingkan dengan alokasi waktu penyelesaian sesuai SOP	1	1	100%	1	1	100%

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan hal perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2013 adalah tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan. Hal ini dikarenakan diantara kedua realisasi antara Tahun 2013 dan 2014 tiada skor yang berbeda. Itupun menjadi kesepakatan bahwa angka skor ideal adalah 1, dalam artian peningkatan sebaik apapun khusus dalam indikator sasaran ini jika dihitung dengan lama hari dengan kenyataan pelayanan yang tidak sampai 1 hari maka 1 hari dibandingkan 1 hari maka skor ideal seperti diatas maka adalah 1.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling	Jumlah kelompok Siskamling aktif dibandingkan dengan jumlah RW	0,23	0,23	100%	0,26	0,26	100%

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan melalui Siskamling, berkaitan dengan hal perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2013 adalah bahwa terdapat selisih realisasi sebesar 0,03. Sedangkan peningkatan kenaikan yang terjadi antara Realisasi pada Tahun 2014 dengan Tahun 2013 adalah sebesar 13%.

2. b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian 2014 dengan beberapa Tahun Terakhir (2011, 2012, 2013, dan 2014)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah peserta Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah penduduk	0,0015	0,0015	100%	0,0016	0,0016	100%	0,0017	0,0017	100%	0,0019	0,0019	100%

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbangcam, berkaitan dengan hal perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2014 dengan beberapa tahun terakhir adalah bahwa terdapat trend kenaikan yang progresif. Sedangkan peningkatan kenaikan yang terjadi antara Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2013 adalah sebesar 11,7%, Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2012 sebesar 18,7%, Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2011 sebesar 26,6%. Kenaikan rata-rata yang dapat dihitung dari perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sebesar 19%.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Rata-rata lama hari proses penyelesaian dibandingkan dengan alokasi waktu penyelesaian sesuai SOP	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2014 dengan beberapa tahun terakhir adalah tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan. Hal ini dikarenakan diantara kedua realisasi antara Tahun 2014 dan sampai dengan 2011 tiada skor yang berbeda. Itupun menjadi kesepakatan bahwa angka skor ideal adalah 1, dalam artian peningkatan sebaik apapun khusus dalam indikator sasaran ini jika dihitung dengan lama hari dengan kenyataan pelayanan yang tidak sampai 1 hari maka 1 hari dibandingkan 1 hari maka skor ideal seperti diatas maka adalah 1.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling	Jumlah kelompok Siskamling aktif dibandingkan dengan jumlah RW	0,20	0,20	100%	0,22	0,22	100%	0,23	0,23	100%	0,26	0,26	100%

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan melalui Siskamling, berkaitan dengan perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2014 dengan beberapa tahun terakhir adalah bahwa terdapat selisih realisasi sebesar 0,03. Sedangkan peningkatan kenaikan yang terjadi antara Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2013 adalah sebesar 13%, Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2012 sebesar 18,2%, Realisasi Tahun 2014 dengan Tahun 2011 sebesar 30%. Kenaikan rata-rata yang dapat dihitung dari perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sebesar 20,4%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah pada Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3			4		7	8	7	8							
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah peserta Musrenbangcam dibandingkan dengan jumlah penduduk	0,0015	0,0015	100%	0,0016	0,0016	100%	0,0017	0,0017	100%	0,0019	0,0019	100%	0,002	0,002	100%

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbangcam, berkaitan dengan perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2014 dengan target jangka menengah pada Renstra adalah korelasi pada akhir pencapaian akhir Rencana Strategis 2015 masih diproyeksikan terjadinya kenaikan, yang otomatis pencapaian realisasi kinerjanya berasumsi positif.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3			4		7	8	7	8							
2	Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Rata-rata lama hari proses penyelesaian dibandingkan dengan alokasi waktu penyelesaian sesuai SOP	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2014 dengan target jangka menengah pada Renstra adalah korelasi pada akhir pencapaian akhir Rencana Strategis 2015 masih diproyeksikan terjadinya kestabilan realisasi, yang otomatis pencapaian realisasi kinerjanya berasumsi positif di Tahun 2015 sebagai akhir perjanjian sesuai RPJMD Kabupaten Malang.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3			4		7	8	7	8							
3	Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling	Jumlah kelompok Siskamling aktif dibandingkan dengan jumlah RW	0,20	0,20	100%	0,22	0,22	100%	0,23	0,23	100%	0,26	0,26	100%	0,28	0,28	100%

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling, berkaitan dengan perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2014 dengan target jangka menengah pada Renstra adalah korelasi pada akhir pencapaian akhir Rencana Strategis 2015 masih diproyeksikan terjadinya kenaikan target dan pemenuhan realisasinya, yang otomatis pencapaian realisasi kinerjanya berasumsi positif di Tahun 2015.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Pada perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dibandingkan dengan Standar Nasional masih belum dapat diukur untuk tingkat SKPD Kecamatan karena kecamatan tidak memiliki SPM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

a. Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

- **Penyebab Kegagalan :**

Tidak tercapainya realisasi dari target Musrenbangcam 2014 disebabkan karena faktor cuaca pada saat dilaksanakannya acara tersebut dimana curah hujan tinggi sehingga terdapat 3 orang dari undangan yang tidak hadir terkendala cuaca di samping itu juga terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia, selain itu faktor kegiatan yang bersamaan dan ijin karena suatu hal sehingga quota yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai

- **Solusi**

Sebagai bahan masukan langkah antisipasi berupa delegasi cadangan diperlukan untuk memenuhi quota yang ditetapkan. Koordinasi cepat, baik dengan pihak desa maupun dinas/ instansi dilakukan sebelum acara dimulai.

b. Indikator Tingkat Kelancaran Proses administrasi kependudukan.

- **Penyebab Keberhasilan**

Tercapainya realisasi kinerja dari target kelancaran proses Administrasi Kependudukan seperti ulasan lalu disebabkan

karena dalam faktor internal yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif, juga didukung dengan kualitas dan kemampuan petugas layanan.

- **Alternatif solusi**

Hal ini perlu dipertahankan, maksimal lebih ditingkatkan pada tahun kedepan. Diluar hal teknis internal, baik sarana dan prasarana serta kemampuan petugas, juga tentang sikap ramah dan sopan santun dalam pelayanan tentunya juga perlu diperhatikan. Sehingga target dan realisasi akan tercapai serta linier dengan tingkat kepuasan masyarakat.

c. Tingkat Keamanan Lingkungan dilihat dari Keaktifan Siskamling

- **Penyebab Keberhasilan**

Tercapainya target realisasi dari tingkat partisipasi masyarakat dibidang keamanan lingkungan melalui Keaktifan Siskamling pada Tahun 2014 sebenarnya tercermin dari pola komunikasi dan koordinasi serta pembinaan yang dilakukan oleh setiap unsur kemuspikaan terhadap desa sampai dengan tingkat bawah.

- **Alternatif Solusi**

Upaya paling efektif untuk membina dan menjaga agar hal ini tetap bertahan adalah dengan pola pendekatan langsung kepada kegiatan Siskamling di masyarakat. Setiap aparatur yang bertanggung jawab sesuai bidang keamanan lingkungan secara periodik harus melakukan hal tersebut diatas, mencatat setiap perubahan dinamika Siskamling di setiap titik Poskamling di desa se-Kecamatan Poncokusumo.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia di Kecamatan Poncokusumo meskipun jumlahnya terbatas dibandingkan dengan beban kerja telah digunakan secara optimal. Masing-masing personil bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Apabila ada salah satu atau beberapa personil tidak hadir, maka personil yang lain bisa membantu melaksanakan tugasnya karena masing-masing pekerjaan ada *Standart Operating Procedure* (SOP), sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas dan tetap menunjang kinerja di Kecamatan Poncokusumo.
2. Anggaran yang ada di Kecamatan Poncokusumo telah digunakan secara efisien. Dari total anggaran yang ada 100 % terserap.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Semua program dan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Poncokusumo merupakan faktor penunjang keberhasilan kinerja sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya kegagalan. Kecamatan Poncokusumo sebagai instansi pelayanan publik kepada masyarakat berkomitmen melaksanakan semua program dan kegiatan yang *Final Goal* diharapkan tingkat Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu semua program dan kegiatan di Kecamatan Poncokusumo menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

A. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2014 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil

pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- dapat terserap 100 % sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7

REALISASI ANGGARAN

No	Sasaran	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	1. Penyediaan jasa sumberdaya Air dan Listrik	11.100.000,-	3.500.000,-	31,5%
		2. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	30.312.000,-	15.156.000,-	50%
		3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,-	2.000.000,-	33,3%
		4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.390.000,-	2.500.000,-	24%
		5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.013.000,-	1.750.000,-	14,5%
		6. Penyediaan Makanan dan Minuman	37.800.000,-	10.000.000,-	26,4%
		7. Rapat-rapat koordinasi dan kordinasi ke dalam daerah	71.200.000,-	71.200.000,-	100%
		8. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	30.000.000,-	15.000.000,-	50%
		9. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	29.710.000,-	15.000.000,-	50,5%
2.	Peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan	1. Penyediaan jasa sumberdaya Air dan Listrik	11.100.000,-	7.600.000,-	68,5%
		2. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	30.312.000,-	15.000.000,-	49,5%
		3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000,-	4.000.000,-	66,6%
		4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.390.000,-	6.500.000,-	62,5%
		5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.013.000,-	7.000.000,-	58,3%
		6. Penyediaan Makanan dan Minuman	37.800.000,-	12.600.000,-	33,3%

No	Sasaran	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		7. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	30.000.000,-	15.000.000,-	50%
3.	Peningkatan keamanan lingkungan melalui Siskamling	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.390.000,-	1.390.000,-	13,4%
		2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.013.000,-	3.263.000,-	27,2%
		3. Penyediaan Makanan dan Minuman	37.800.000,-	15.200.000,-	40,2%
		4. Pendidikan dan pelatihan formal	1.800.000,-	1.800.000,-	100%
		9. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	29.710.000,-	14.710.000,-	49,5%
		5. Tersedianya pakaian dinas serta perlengkapannya	5.000.000,-	5.000.000,-	100%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kantor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Dalam perseptif, LKj ini berfungsi juga sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Misi dari Kantor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Adapun sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan salah satu bagian dari 6 komponen yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah. Pelaporan kinerja dilaksanakan mengacu kepada Renstra dan Renja yang dibuat dalam konteks hal perencanaan.

Demikian LKj Kecamatan Poncokusumo Tahun 2014 ini kami laporkan. Tentunya belumlah sempurna kinerja yang telah dilakukan, masih terdapat kelemahan sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan.

CAMAT PONCOKUSUMO

Drs. SUKARLIN ,M.Si
Pembina
NIP. 19650202 198710 1 001